

KONDISI KREDIT USAHA SELAMA PANDEMI DI PROVINSI JAWA BARAT

Berta Dian Theodora

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
Berta.dtos@gmail.com

Dikirim : 21 Juni 2021. Direvisi : 23 Juni 2021. Dipublikasikan : 30 Juni 2021

ABSTRAK

Nilai kredit yang disalurkan kepada pelaku usaha terus meningkat setiap tahunnya, namun saat terjadi kondisi pandemic terlihat jumlah kredit usaha yang diberikan bank setiap bulannya fluktuatif. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 49,94 juta jiwa, secara administrative pemerintahannya terbagi menjadi 27 kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kredit usaha di setiap kabupaten dan kota selama masa pandemi. Jenis data penelitian adalah data sekunder yang berasal dari Bank Indonesia dan BPS Provinsi Jawa Barat. Penelitian kuantitatif dan metode deskriptif dengan data sampel adalah kredit usaha UMKM kabupaten dan kota di Jawa Barat dari bulan April 2020 sampai dengan April 2021. Hasil yang diperoleh kredit usaha kecil dan menengah mengalami peningkatan namun kredit usaha mikro menurun setiap bulannya. Kredit usaha merupakan bagian dari modal finansial dan merupakan salah satu faktor yang menentukan jumlah output, sehingga penambahan kredit usaha diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya menyerap tenaga kerja.

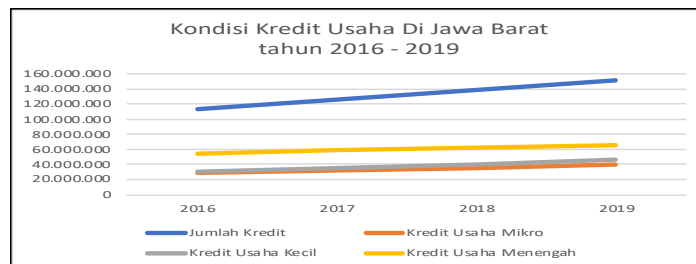
Keywords: Kredit, UMKM, Jawa Barat,

A. PENDAHULUAN

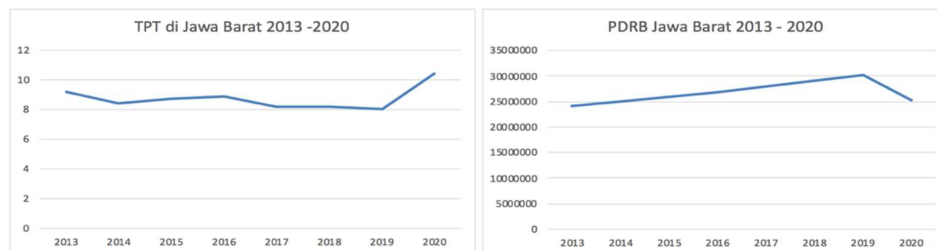
Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian karena UMKM adalah salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar dan merupakan alternatif solusi bagi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat merupakan aktivitas perekonomian yang mampu bertahan dalam krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2000 (Goeltom, 2005), kondisi UMKM di Jawa Barat tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit usaha. Kondisi 4 tahun sebelum terjadinya pandemic yaitu pada tahun 2016-2019 (gambar.1) jumlah kredit UMKM yang diberikan oleh pihak bank mengalami pertumbuhan dari tahun ketahunnya dengan rata-rata 10,26% pertahun?. Kondisi modal kerja yang berfluktuasi terutama ketika mengalami penurunan akan mengakibatkan tingkat *output* produksi (produk domestik regional bruto/PDRB) menurun sehingga dikhawatirkan penyerapan jumlah tenaga kerja yang kurang maksimal. Secara umum, kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan PDRB di Provinsi Jawa Barat terlihat pada gambar 2.

Tingkat pengangguran terbuka dan PDRB (gambar 2) di Provinsi Jawa Barat yang diperhitungkan secara tahunan, memperlihatkan bahwa dari tahun 2013 – 2019 ketika perekonomian berjalan dengan normal maka perubahan pada TPT berkisar di angka 8% - 9% namun ketika terjadi kondisi pandemi maka angka TPT meningkat menjadi di atas 10% tepatnya berada di angka 10,46 (bps.go.id.2021) dan PDRB Provinsi pada tahun terjadinya pandemi, kondisi PDRB dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 16,32%.

Peningkatan TPT dan penurunan PDRB yang dihitung dalam periode tahunan menjadi gambaran bahwa selama terjadinya pandemi di tahun 2020 telah mengakibatkan perekonomian menurun. Untuk meningkatkan kembali perekonomian, pemerintah mengupayakan stimulus bagi para pelaku ekonomi dengan berbagai cara untuk meningkatkan kembali perekonomian diantaranya adalah dengan memberikan stimulus kredit usaha agar pengusaha terus menjalankan usahanya dan melakukan produksi.



Gambar 1. Kondisi Kredit Usaha di Jawa Barat tahun 2016 -2019
Sumber : Bank Indonesia.2021



Gambar 2. Kondisi TPT dan PDRB di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2020
Sumber : BPS Jawa Barat. 2021

Data Bank Indonesia (BI) secara nasional menunjukkan per Juli 2020 kredit UMKM turun 0,5% secara *year on year* (yoy), hal ini lebih dalam 0,1% dari bulan sebelumnya sehingga pemerintah dan perbankan semakin gencar dalam penyaluran kredit ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah. BI mencatat terjadinya kontraksi sebesar -2,7% yoy di akhir bulan Februari 2021 pada realisasi kredit UMKM, dan hal ini sejalan dengan penurunan yang terjadi di bulan Januari 2021 yaitu terkontraksi sebesar -2,4%. Kontraksi ini disumbang dari usaha mikro yang turun sebesar -23,6% yoy, namun segmen kecil dan menengah pada dua bulan pertama tercatat mengalami kenaikan sebesar 4,3% dan 5,3%. Data Statistik Perbankan Indonesia di OJK mencatatkan bahwa kredit UMKM terus mengalami

penurunan sejak Maret hingga Juli 2020 dan mulai tumbuh di bulan Agustus 2020 (Republika.co.id.2020).

Namun bagaimanakah kondisi kredit usaha di Provinsi Jawa Barat khususnya pada setiap kabupaten dan kota selama terjadinya pandemi, apakah tingkat kredit usaha mengalami penurunan ataukah peningkatan guna menjaga modal usaha. Kondisi pandemi yang jelas berpengaruh terhadap perekonomian terlihat pada gambar.3 yaitu PDRB tahunan Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun 2019 ketahun 2020, namun apakah kredit usaha sebagai stimulus dari pemerintah kepada wirausaha-wirausaha mikro, kecil dan menengah telah terserap secara maksimal ataukah selama masa pandemi para pengusaha lebih memilih mengurangi kredit karena usaha tidak berproduksi sehingga tidak memerlukan modal tambahan ?.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kredit usaha yang merupakan bagian dari *financial capital* dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan jumlah output, sehingga penambahan kredit usaha diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor kredit usaha selain berpengaruh terhadap *output* perekonomian, memiliki pengaruh juga terhadap sektor tenaga kerja atau kondisi pengangguran, keberadaan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat menjadi indikator yang mengukur tingkat penawaran tenaga kerja dan keterserapan tenaga kerja oleh pasar kerja.

Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) mengartikan UMKM sebagai pelaku usaha ekonomi yang dikategorikan sebagai usaha dengan skala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana. (Laena, 2010) dan *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan independen yang mempekerjakan karyawan kurang dari jumlah tertentu. Batasan jumlah ini bervariasi antar negara, dimana paling umum UMKM adalah perusahaan yang mempekerjakan karyawan kurang dari 250 karyawan, Usaha kecil umumnya adalah usaha yang mempekerjakan karyawan kurang dari 50 karyawan, sementara usaha mikro adalah usaha yang mempekerjakan karyawan paling banyak 10 orang, bahkan dalam beberapa kasus hanya 5 karyawan saja. (OECD, 2005:17).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) memberikan kriteria bagi UMKM yang digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki sebuah usaha. Adapun kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Aset (Rp)	Penjualan Tahunan (Rp)
1	Usaha Mikro	< 50 Juta	< 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Milyar – 50 Miliar

Sumber : UU Nomor 20 Tahun 2008.

Pemerintah sangat mendorong dan mendukung keberadaan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), sebagai penopang tatanan perekonomian

Indonesia dan keberadaan bank dalam fungsinya sebagai penyalur kredit dapat menjadi salah satu wujud pemerintah dalam mendorong dan mendukung keberadaan UMKM, penyaluran kredit ini harus bermanfaat dan dirasakan langsung oleh para pelaku usaha khususnya sektor UMKM. Secara umum kredit dapat dilihat dari segi tujuan kredit diberikannya itu kredit produktif dan kredit konsumtif, kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, dan diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa, sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk konsumsi pribadi, yang tidak menghasilkan pertambahan barang dan jasa

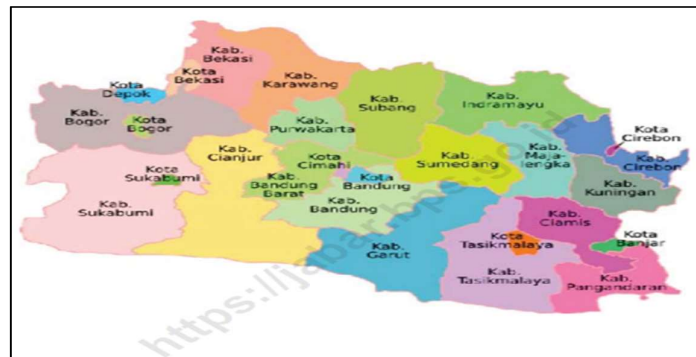
Undang - undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan tepatnya pada pasal 1 angka 11 menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kasmir (2013) menjelaskan fungsi fasilitas kredit antara lain: 1) meningkatkan daya guna uang, 2) meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, 3) meningkatkan daya guna barang, 4) meningkatkan peredaran barang, 5) sebagai alat stabilitas ekonomi, 6) meningkatkan pemerataan pendapatan, 7) meningkatkan hubungan internasional, dan 8) meningkatkan kegairahan berusaha bagi penerima kredit apalagi bagi nasabah yang modalnya terbatas. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu yang tidak akan terlepas dari misi bank dan tujuan utama pemberian kredit adalah: 1) Mencari keuntungan yaitu berupa bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah; 2) Membantu usaha nasabah, secara khusus nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja yang akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya; 3) Membantu pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor (Kasmir, 2013).

Prinsip dasar dalam menganalisis kredit menurut Veithzal dan Andria (2007) yaitu: 1) *Character*: keadaan watak/sifat dari nasabah, 2) *Capital*: dana/modal sendiri yang oleh calon nasabah, 3) *Capacity*: kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya yang akan memperoleh laba yang diharapkan, 4) *Collateral*: barang-barang yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya, 5) *Condition of Economic*: situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang akan mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur, 6) *Constraint* adalah batas dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tepat waktu.

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan penduduk terbanyak, yakni 49,94 juta jiwa dengan luas wilayah 35.377,76 KM², secara administratif pemerintahan di Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/ kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota (Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten

Cirebon, KabupatenMajalengka, KabupatenSumedang, KabupatenIndramayu, Kabupaten Subang, KabupatenPurwakarta, KabupatenKarawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kotayaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar)



Gambar 3. Pembagian Wilayah AdministratifProvinsiJawa Barat
 Sumber: Jabardalam angka.2020

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi penyaluran kredit usaha yang diberikan oleh pihak bank disetiap kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Barat selama masa pandemi. Jenis data penelitian adalah data sekunder berasal dari situs Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif statistik untuk menggambarkan kondisi kredit usaha di Provinsi Jawa Barat selama terjadinya pandemi. Populasi penelitian adalah hak kredit yang disalurkan oleh bank disetiap Kabupaten dan Kota di kawasan Provinsi Jawa Barat. Sampel penelitian adalah data kredit usaha mikro, kecil dan menengah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat mulai April 2020 sampai April 2021, yaitu kurun waktu terjadinya pandemi di Indonesia.

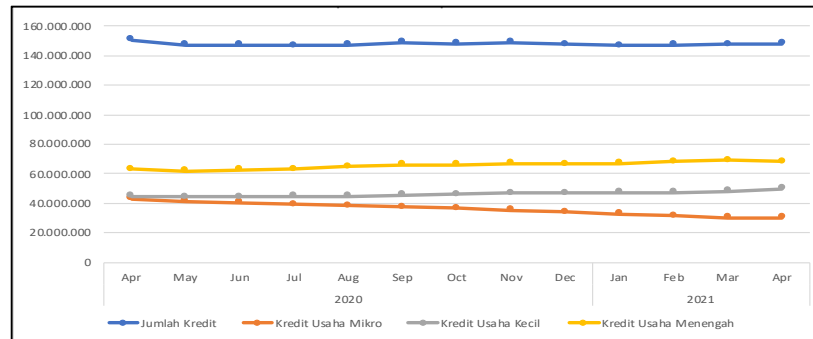
D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi pokok bank dalam hal penyaluran dana, salah satu bentuk kredit yang dikenal adalah jenis kredit produktif kepada UMKM yang digunakan untuk membiayai dan membantu kegiatan produksi usaha. Pemberian Kredit kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah dicatatkan secara berbeda oleh Bank Indonesia dan kondisi pemberian kredit di Provinsi Jawa Barat selama periode April 2020 – April 2021 terlihat pada tabel 3.

Nilai kredit yang disalurkan kepada usaha terus meningkat setiap tahunnya, namun ketika terjadi pandemi terlihat bahwa besaran jumlah kredit usaha

yang diberikan oleh pihak bank setiap bulannya mengalami fluktuasi (gambar.5), kredit pada usaha kecil dan menengah mengalami peningkatan namun kredit pada usaha mikro semakin menurun setiap bulannya.

Kredit usaha merupakan bagian dari *financial capital* dan menjadi salah satu faktor yang menentukan jumlah output, sehingga penambahan kredit usaha diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya menyerap tenaga kerja.



Gambar 4. Kondisi Kredit UMKM di Provinsi Jawa Barat
 Sumber: diolah Peneliti.2021

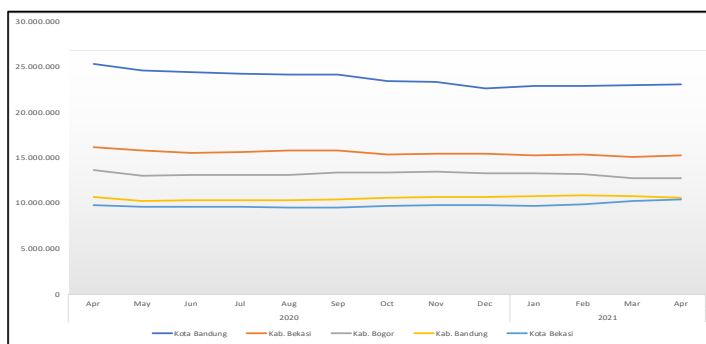
UMKM yang adalah bentuk usaha yang didirikan secara individu dan atau berkelompok di kalangan masyarakat memiliki permodalan yang terbatas dan pinjaman dari pihak lain seperti perbankan menjadi salah satu pilihan untuk menjalankan usaha. Gambar 4 menunjukkan sejak bulan ke-2 masa pandemi yaitu bulan April 2020 sampai dengan April 2021 angka penyaluran kredit kategori usaha mikro mengalami penurunan, sedangkan jumlah kredit pada usaha kecil dan menengah mengalami peningkatan. Penyaluran kredit selama masa pandemi dilakukan sebagai salah satu stimulus yang diberikan pemerintah agar para pengusaha dapat mempertahankan usahanya dan melanjutkan produksi.

Sejak awal pandemi Covid-19 dibulan maret 2020, pihak pemerintah dan perbankan mulai memfokuskan kredit kepada pengusaha pada tingkat mikro, kecil dan menengah, komitmen ini berlanjut dengan adanya stimulus dan relaksasi dari pemerintah dan perbankan, sebagai salah satu contoh, komitmen dari salah satu bank BUMN, yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang menuangkan kebijakan stimulus dan relaksasi pemerintah dalam 3 (tiga) strategi utamanya yaitu:
 1) fasemitigasi dampak pandemi bagi debitur lewat restrukturisasi kredit terhadap lebih dari 100.000 debitur; 2) BNI mendorong adaptasi digital bagi pelaku usaha; dan 3) lewat pemulihan UMKM terdampak pandemi, sejalan dengan komitmen tersebut. Pemberian kredit akan membantu usaha yang memerlukan dana investasi ataupun dana modal kerja sehingga usaha tersebut dapat berkembang, penyaluran kredit turut membantu pemerintah, semakin banyak kredit diberikan diharapkan akan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. (Kontan.co.id.2021)

Ketika melihat kondisi di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa wilayah yang mengalami peningkatan dan penurunan penyaluran kredit (tabel 2 dan 3). Kabupaten dan Kota dengan tingkat kredit tertinggi terlihat pada gambar 5, Kota Bandung yang memiliki tingkat kredit tertinggi di antara seluruh wilayah administratif di Provinsi Jawa Barat, mengalami penurunan sejak April 2020 hingga Desember 2020 lalu mulai mengalami kenaikan pada Januari tahun 2021 dan semakin meningkat sampai dengan April 2021 walaupun belum kembali pada angka sebelum terjadinya pandemi.

Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Kota Bekasi terlihat mengalami kondisi fluktuatif setiap bulannya, tidak terlihat penurunan dalam jangka waktu beberapa bulan-bulan seperti yang dialami Kota Bandung. Kondisi pada setiap wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat mengenai angka kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah terlihat pada tabel 2 dan 3.

Upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan UMKM perlu selalu dilakukan baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha sendiri, pemerintah diharapkan membangun lokasi-lokasi usaha baru yang bisa menyerap tenaga kerja dan mengembangkan produk lokal. (Marti'ah, 2020).



Gambar 5. Grafik Kondisi Kredit Usaha pada 5 Wilayah dengan Angka Kredit Terbanyak
 Sumber: diolah Peneliti, 2021

Dalam hal permodalan, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik, mulai dari program KUR (Putra dan I ketut, 2018) sampai dengan paket kebijakan yang berpihak pada UMKM. Dalam hal pemasaran, strategi pengembangan UMKM dapat memanfaatkan pertumbuhan internet saat ini. Pelaku UMKM dapat membuka peluang untuk memperluas jangkauan pasarnya melalui *e-commerce* dan jejaring media sosial. Untuk distribusi produk UMKM ke pelanggan, pelaku UMKM dapat memanfaatkan pertumbuhan perusahaan jasa pengiriman yang jumlahnya cukup banyak, baik tingkat lokal maupun nasional (Permana, 2017). Pertumbuhan ekonomi regional dapat ditingkatkan melalui pemberian kredit atau pembiayaan UMKM, hal ini perlu didorong agar para pemilik usaha dapat terus berproduksi dan

semakin meningkat kegiatan perekonomian di masyarakat secara umum. (Putra dan I Ketut.2018; Anggraini dan Haryad.2020).

Selama masa pandemi terjadi pembatasan sosial dan fisik yang menyebabkan interaksi jual-beli secara tradisional semakin sulit dilakukan dan agar usaha dapat terus berjalan, para pemilik usaha disarankan menggunakan teknologi, terutama pasar digital yang semakin berkembang. Pemerintah diharapkan dapat membantu pengusaha untuk melakukan pelatihan penjual an produk secara digital dan perencanaan secara strategis agar pendapatan meningkat (Ardiansyah.2020; Apriyanti.2020).

E. SIMPULAN

Kondisi kredit usaha pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berbedadise tiap kategori usaha. Secara umum terlihat bahwa sejak Januari 2021 angka kredit usaha mulai beranjak naik di setiap kabupaten dan kota. Peningkatan kredit UMKM pada wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat akan mendatangandampak secara khusus terhadap jumlah UMKM dan secara umum kepada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini terlihat ketika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi mulai dari Kabupaten, Kota sampai tingkat Provinsi. Peningkatan kredit pada sektor UMKM akan maksimal dirasakan manfaatnya ketika para masyarakat memiliki jiwa kewirausahaan sehingga semakin banyak bermunculan wirausaha-wirausaha baru (*start-up*) dalam membukal lapangan pekerjaan, adanya jiwa wirausaha dikalangan para *start-up* akan membantu mereka mengelola resiko dan memiliki kemampuan bertahap dalam kondisi apapun.

Hasil yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kredit pada wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dapat diperoleh jika dilakukan penelitian yang mencakup rentang waktu sebelum terjadinya pandemi. Penulis menyarankan agar dilakukan kajian menggunakan rentang waktu yang lebih Panjang serta mempertimbangkan variabel- variabel lain yang mempunyai keterkaitan berdasarkan teori terhadap variabel kredit UMKM, sehingga penelitian lebih menggambarkan kondisi kredit di Jawa Barat secara komprehensif.

Tabel 3. Kredit Usaha Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat Januari – April 2021

Kota/Kabupaten dan Kriteria Usaha		2021				
		Jan	Feb	Mar	Apr	
1	Kab. Bekasi	Total	15.307.534	15.319.122	15.062.485	15.218.996
		Mikro	1.866.394	1.810.964	1.776.300	1.759.876
		Kecil	4.809.991	4.806.830	4.779.498	4.978.449
		Menengah	8.631.149	8.701.327	8.506.687	8.480.672
2	Kab. Purwakarta	Total	2.349.396	2.372.659	2.382.382	2.415.913
		Mikro	694.788	666.258	633.978	616.388
		Kecil	969.465	993.880	1.013.356	1.061.532

		Menengah	685.143	712.520	735.048	737.993
		Total	7.241.161	7.278.997	7.384.629	7.527.716
3	Kab. Karawang	Mikro	1.893.290	1.842.964	1.787.469	1.754.512
		Kecil	2.486.121	2.448.061	2.490.265	2.626.187
		Menengah	2.861.751	2.987.972	3.106.895	3.147.018
		Total	13.276.776	13.154.147	12.714.242	12.779.901
4	Kab. Bogor	Mikro	2.414.382	2.346.506	2.268.153	2.256.652
		Kecil	3.865.350	3.783.661	3.532.419	3.646.619
		Menengah	6.997.044	7.023.981	6.913.669	6.876.629
		Total	4.403.097	4.376.889	4.360.841	4.350.154
5	Kab. Sukabumi	Mikro	1.487.908	1.417.053	1.342.324	1.301.839
		Kecil	1.594.391	1.577.529	1.581.195	1.637.626
		Menengah	1.320.797	1.382.308	1.437.322	1.410.689
		Total	3.858.208	3.884.387	3.915.477	3.922.353
6	Kab. Cianjur	Mikro	1.157.374	1.109.346	1.044.290	1.015.869
		Kecil	1.395.963	1.411.685	1.453.739	1.526.491
		Menengah	1.304.871	1.363.356	1.417.448	1.379.993
		Total	10.783.334	10.834.361	10.772.739	10.600.366
7	Kab. Bandung	Mikro	2.740.662	2.625.048	2.511.430	2.392.536
		Kecil	3.385.984	3.406.529	3.357.439	3.493.570
		Menengah	4.656.688	4.802.784	4.903.871	4.714.260
		Total	3.590.834	3.518.339	3.526.349	3.572.951
8	Kab. Sumedang	Mikro	1.349.873	1.286.613	1.233.315	1.205.123
		Kecil	1.284.741	1.225.928	1.234.496	1.293.151
		Menengah	956.220	1.005.798	1.058.538	1.074.678
		Total	4.281.331	4.267.191	4.181.612	4.192.631
9	Kab. Tasikmalaya	Mikro	2.051.648	1.954.128	1.845.998	1.782.767
		Kecil	1.156.471	1.187.100	1.164.594	1.312.235
		Menengah	1.073.212	1.125.962	1.171.021	1.097.629
		Total	4.280.972	4.304.158	4.320.096	4.260.340
10	Kab. Garut	Mikro	1.417.480	1.352.994	1.282.347	1.244.311
		Kecil	1.425.559	1.459.694	1.478.203	1.582.319
		Menengah	1.437.933	1.491.469	1.559.546	1.433.709
		Total	3.026.975	3.048.886	3.075.084	3.107.217
11	Kab. Ciamis	Mikro	985.553	937.051	881.822	881.428
		Kecil	1.319.359	1.309.649	1.312.029	1.386.424
		Menengah	722.063	802.185	881.234	839.365
		Total	4.494.314	4.583.679	4.672.855	4.671.571
12	Kab. Cirebon	Mikro	1.152.768	1.125.656	1.087.203	1.080.618

		Kecil	1.550.564	1.650.425	1.731.432	1.780.288
		Menengah	1.790.982	1.807.599	1.854.219	1.810.665
		Total	3.309.540	3.389.165	3.386.803	3.390.742
13	Kab. Kuningan	Mikro	1.238.635	1.180.913	1.129.435	1.111.761
		Kecil	1.130.796	1.149.014	1.160.862	1.208.328
		Menengah	940.109	1.059.237	1.096.505	1.070.654
		Total	4.233.995	4.183.381	4.222.643	4.217.783
14	Kab. Indramayu	Mikro	1.820.441	1.789.207	1.761.799	1.747.556
		Kecil	1.502.517	1.463.929	1.494.225	1.541.550
		Menengah	911.036	930.246	966.619	928.677
		Total	2.949.152	2.959.719	2.967.487	3.003.703
15	Kab. Majalengka	Mikro	1.112.513	1.066.493	1.026.833	1.000.991
		Kecil	1.071.040	1.088.611	1.106.783	1.181.864
		Menengah	765.599	804.615	833.871	820.848
		Total	4.321.150	4.296.309	4.333.456	4.351.936
16	Kab. Subang	Mikro	1.694.842	1.646.595	1.495.431	1.476.846
		Kecil	1.464.012	1.442.554	1.459.780	1.527.843
		Menengah	1.162.296	1.207.161	1.378.245	1.347.247
		Total	1.598.417	1.683.045	1.780.581	1.834.347
17	Kab. Bandung Barat	Mikro	256.815	256.566	252.606	270.748
		Kecil	757.128	772.158	810.246	850.410
		Menengah	584.473	654.320	717.729	713.190
		Total	2.217.364	2.153.917	2.099.738	2.047.789
18	Kota Banjar	Mikro	999.440	935.141	871.680	825.728
		Kecil	498.417	508.252	521.289	546.891
		Menengah	719.507	710.524	706.769	675.170
		Total	22.874.641	22.907.588	22.970.967	23.062.338
19	Kota Bandung	Mikro	2.127.638	2.109.149	2.046.771	2.121.616
		Kecil	4.763.390	4.859.343	4.932.477	5.009.232
		Menengah	15.983.614	15.939.097	15.991.718	15.931.490
		Total	4.555.880	4.645.272	4.767.568	4.870.562
20	Kota Bogor	Mikro	1.010.263	1.041.156	1.069.530	1.157.004
		Kecil	1.231.848	1.234.976	1.338.496	1.371.351
		Menengah	2.313.768	2.369.141	2.359.543	2.342.208
		Total	1.315.716	1.305.088	1.321.838	1.289.215
21	Kota Sukabumi	Mikro	227.538	213.850	208.429	201.203
		Kecil	501.922	481.355	486.611	501.956
		Menengah	586.257	609.884	626.797	586.056
22	Kota Cirebon	Total	1.820.659	1.836.833	1.901.472	1.822.146

		Mikro	182.233	176.875	171.507	179.252
		Kecil	606.502	611.379	605.898	627.445
		Menengah	1.031.924	1.048.579	1.124.067	1.015.449
		Total	3.319.192	3.361.254	3.461.668	3.447.609
23	Kota Tasikmalaya	Mikro	332.260	326.541	302.165	314.041
		Kecil	1.286.046	1.277.893	1.359.252	1.346.285
		Menengah	1.700.886	1.756.820	1.800.251	1.787.283
		Total	1.721.190	1.736.449	1.766.234	1.739.236
24	Kota Cimahi	Mikro	307.838	305.989	296.683	295.054
		Kecil	551.723	571.014	596.008	607.112
		Menengah	861.629	859.445	873.544	837.070
		Total	5.715.345	5.744.403	6.114.821	5.983.462
25	Kota Depok	Mikro	1.144.862	1.054.303	1.079.850	1.081.528
		Kecil	2.358.959	2.398.946	2.661.872	2.563.588
		Menengah	2.211.524	2.291.154	2.373.099	2.338.346
		Total	9.701.571	9.844.245	10.208.336	10.400.133
26	Kota Bekasi	Mikro	992.272	962.840	926.078	962.313
		Kecil	4.178.565	4.224.535	4.422.648	4.594.154
		Menengah	4.530.735	4.656.870	4.859.610	4.843.666
		Total	152.040	156.651	159.133	161.975
27	Kab. Pangandaran	Mikro	14.001	14.005	14.241	13.888
		Kecil	130.525	134.947	136.910	140.593
		Menengah	7.514	7.700	7.983	7.495
		Total	146.699.784	147.146.136	147.831.535	148.243.088
28	JAWA BARAT	Mikro	32.673.711	31.554.205	30.347.667	30.051.448
		Kecil	47.277.349	47.479.877	48.222.022	49.943.492
		Menengah	66.748.724	68.112.054	69.261.846	68.248.147

Sumber : bi.go.id.2021

Tabel 2. Kredit Usaha Wilayah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat April – Desember 2020

Kota/Kabupaten dan Kriteria Usaha			2020								
			Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Kab. Bekasi	Total	16.132.328	15.822.168	15.539.480	15.607.042	15.767.787	15.842.996	15.387.133	15.408.055	15.443.227
		Mikro	2.908.921	2.349.001	2.313.996	2.248.160	2.187.228	2.137.443	2.090.270	2.040.575	1.969.983
		Kecil	4.413.827	4.392.498	4.370.992	4.376.828	4.437.766	4.552.864	4.622.589	4.667.169	4.727.987
		Menengah	8.809.580	9.080.669	8.854.492	8.982.054	9.142.793	9.152.689	8.674.275	8.700.312	8.745.258
2	Kab. Purwakarta	Total	2.424.398	2.362.490	2.369.868	2.362.862	2.359.266	2.404.924	2.345.855	2.464.698	2.382.132
		Mikro	950.583	939.296	916.057	881.339	848.413	819.965	796.708	765.168	734.286
		Kecil	856.940	842.241	840.442	847.741	854.761	883.687	920.260	933.869	956.453
		Menengah	616.875	580.953	613.368	633.781	656.092	701.272	628.886	765.661	691.393
3	Kab. Karawang	Total	7.472.998	7.497.097	7.410.893	7.314.624	7.404.746	7.351.688	7.369.510	7.496.799	7.307.650
		Mikro	2.467.019	2.458.389	2.389.287	2.318.712	2.251.115	2.191.414	2.133.181	2.072.831	1.998.971
		Kecil	2.329.735	2.309.974	2.321.246	2.315.195	2.328.744	2.380.903	2.386.350	2.399.325	2.416.431
		Menengah	2.676.244	2.728.734	2.700.360	2.680.716	2.824.887	2.779.371	2.849.980	3.024.643	2.892.248
4	Kab. Bogor	Total	13.609.366	13.050.683	13.096.779	13.127.021	13.066.638	13.362.393	13.365.153	13.465.445	13.293.944
		Mikro	3.497.275	3.136.062	3.087.869	2.981.913	2.879.563	2.813.431	2.744.246	2.663.831	2.574.315
		Kecil	3.657.163	3.560.834	3.567.452	3.586.577	3.549.971	3.716.640	3.809.587	3.843.275	3.813.156
		Menengah	6.454.928	6.353.787	6.441.458	6.558.531	6.637.103	6.832.322	6.811.320	6.958.339	6.906.472
5	Kab. Sukabumi	Total	4.604.931	4.476.890	4.573.045	4.530.085	4.529.286	4.548.281	4.510.907	4.474.541	4.453.070
		Mikro	2.070.301	2.052.577	2.002.725	1.926.450	1.850.284	1.780.607	1.716.686	1.641.501	1.570.031
		Kecil	1.526.408	1.489.124	1.511.207	1.507.481	1.515.806	1.534.423	1.520.194	1.545.190	1.564.955
		Menengah	1.008.221	935.188	1.059.113	1.096.154	1.163.196	1.233.251	1.274.027	1.287.850	1.318.084
6	Kab. Cianjur	Total	4.157.228	3.825.658	3.900.497	3.875.396	3.894.307	3.963.441	3.946.228	3.947.533	3.939.294
		Mikro	1.834.713	1.584.543	1.575.398	1.518.266	1.459.952	1.409.816	1.356.228	1.295.711	1.233.880
		Kecil	1.325.878	1.301.074	1.328.973	1.344.355	1.337.582	1.361.087	1.337.698	1.371.654	1.393.345
		Menengah	996.638	940.042	996.127	1.012.775	1.096.773	1.192.538	1.252.302	1.280.169	1.312.068
7	Kab. Bandung	Total	10.698.601	10.268.186	10.322.894	10.286.995	10.294.770	10.448.103	10.551.701	10.686.243	10.693.756
		Mikro	3.525.913	3.435.717	3.383.302	3.264.652	3.169.549	3.087.172	3.006.281	2.974.118	2.781.195
		Kecil	3.111.438	3.097.912	3.124.640	3.144.148	3.169.865	3.252.206	3.268.248	3.354.861	3.427.868
		Menengah	4.061.250	3.734.557	3.814.953	3.878.195	3.955.357	4.108.726	4.277.172	4.357.264	4.484.693
8	Kab. Sumedang	Total	3.357.187	3.298.901	3.314.973	3.350.275	3.504.334	3.609.030	3.687.532	3.702.324	3.629.629
		Mikro	1.784.963	1.769.694	1.725.884	1.674.532	1.630.116	1.579.102	1.538.740	1.487.756	1.419.153
		Kecil	1.058.233	1.032.606	1.038.623	1.060.987	1.201.478	1.234.954	1.282.375	1.304.725	1.279.222
		Menengah	513.991	496.600	550.467	614.755	672.740	794.973	866.417	909.843	931.254

		Total	4.215.272	4.139.271	4.217.442	4.244.210	4.213.563	4.283.986	4.382.916	4.381.279	4.340.570
9	Kab. Tasikmalaya	Mikro	2.818.741	2.789.680	2.755.531	2.669.076	2.523.462	2.443.027	2.411.176	2.254.742	2.158.941
		Kecil	1.006.328	980.936	987.969	1.007.481	1.017.635	1.045.018	1.056.752	1.137.509	1.138.579
		Menengah	390.203	368.655	473.942	567.653	672.467	795.940	914.989	989.028	1.043.049
		Total	4.460.249	4.394.024	4.398.076	4.405.056	4.446.150	4.543.727	4.530.748	4.507.434	4.399.318
10	Kab. Garut	Mikro	1.895.874	1.875.371	1.812.963	1.785.011	1.747.727	1.712.877	1.678.947	1.593.349	1.494.057
		Kecil	1.459.992	1.441.513	1.446.576	1.468.045	1.488.957	1.528.307	1.467.521	1.469.464	1.455.297
		Menengah	1.104.382	1.077.140	1.138.537	1.152.000	1.209.466	1.302.542	1.384.280	1.444.621	1.449.964
		Total	3.006.224	2.991.458	3.005.166	3.034.244	3.063.692	3.107.257	3.137.282	3.159.685	3.061.560
11	Kab. Ciamis	Mikro	1.306.468	1.292.335	1.261.153	1.226.366	1.192.893	1.169.565	1.137.656	1.098.176	1.033.085
		Kecil	1.284.479	1.278.559	1.291.541	1.312.339	1.323.222	1.346.841	1.353.881	1.386.873	1.360.286
		Menengah	415.277	420.564	452.472	495.539	547.577	590.851	645.746	674.636	668.190
		Total	4.507.547	4.413.972	4.427.288	4.404.419	4.414.003	4.418.879	4.479.723	4.530.430	4.539.168
12	Kab. Cirebon	Mikro	1.405.534	1.385.798	1.360.556	1.304.365	1.274.270	1.260.846	1.243.734	1.229.952	1.198.906
		Kecil	1.413.225	1.375.455	1.376.290	1.377.690	1.395.620	1.448.810	1.474.628	1.511.878	1.531.870
		Menengah	1.688.787	1.652.719	1.690.442	1.722.363	1.744.112	1.709.223	1.761.361	1.788.600	1.808.392
		Total	3.253.274	3.190.197	3.218.152	3.179.740	3.229.694	3.259.302	3.313.636	3.360.381	3.310.121
13	Kab. Kuningan	Mikro	1.652.070	1.625.318	1.578.595	1.529.506	1.487.671	1.435.924	1.395.732	1.351.560	1.289.255
		Kecil	1.083.439	1.070.100	1.078.236	1.064.006	1.077.820	1.098.709	1.106.028	1.123.146	1.122.533
		Menengah	517.766	494.779	561.322	586.228	664.203	724.669	811.877	885.675	898.334
		Total	4.244.405	4.137.003	4.159.530	4.100.786	4.112.059	4.151.052	4.261.368	4.330.104	4.308.112
14	Kab. Indramayu	Mikro	2.184.476	2.152.528	2.121.238	2.037.760	1.990.357	1.952.979	1.918.405	1.903.627	1.869.808
		Kecil	1.514.339	1.476.985	1.492.429	1.490.328	1.478.650	1.482.961	1.491.856	1.525.822	1.518.915
		Menengah	545.590	507.490	545.864	572.698	643.053	715.112	851.107	900.655	919.389
15	Kab. Majalengka	Total	2.791.567	2.736.609	2.785.525	2.811.288	2.827.179	2.857.261	2.917.277	2.919.334	2.978.999
		Mikro	1.446.150	1.436.488	1.404.320	1.363.933	1.324.315	1.286.053	1.259.152	1.219.158	1.164.875

		Kecil	999.068	980.399	1.000.916	1.000.580	1.014.762	1.035.124	1.048.595	1.068.647	1.068.742
		Menengah	346.350	319.723	380.289	446.775	488.103	536.084	609.530	631.529	745.382
		Total	4.186.287	4.109.106	4.122.460	4.111.922	4.131.698	4.248.578	4.323.617	4.360.622	4.362.322
16	Kab. Subang	Mikro	2.082.184	2.071.202	2.039.885	1.990.505	1.944.546	1.896.370	1.850.414	1.799.131	1.751.454
		Kecil	1.422.268	1.386.083	1.380.501	1.402.100	1.418.734	1.439.330	1.456.568	1.470.025	1.460.246
		Menengah	681.836	651.821	702.073	719.317	768.418	912.877	1.016.635	1.091.466	1.150.622
17	Kab. Bandung Barat	Total	1.757.875	1.736.618	1.684.920	1.691.311	1.576.182	1.594.417	1.593.838	1.580.024	1.593.634
		Mikro	277.254	275.111	270.128	268.567	264.075	266.083	267.527	269.016	267.652
		Kecil	820.422	824.801	824.924	835.038	726.999	733.775	739.866	747.300	740.122
18	Kota Banjar	Menengah	660.199	636.706	589.868	587.706	585.109	594.559	586.445	563.708	585.859
		Total	2.057.393	2.055.054	2.079.954	2.085.114	2.091.338	2.146.354	2.218.904	2.272.203	2.277.231
		Mikro	1.498.062	1.493.647	1.433.844	1.377.230	1.318.226	1.262.709	1.208.199	1.136.067	1.063.283
19	Kota Bandung	Kecil	401.100	403.073	418.233	414.709	426.787	450.775	465.134	485.389	493.289
		Menengah	158.230	158.334	227.877	293.176	346.324	432.870	545.571	650.747	720.660
		Total	25.299.224	24.612.599	24.395.674	24.213.418	24.114.463	24.162.935	23.434.572	23.310.304	22.625.702
20	Kota Bogor	Mikro	2.841.522	2.516.741	2.505.796	2.531.130	2.474.838	2.431.504	2.361.859	2.298.979	2.272.242
		Kecil	4.710.893	4.656.994	4.666.606	4.633.462	4.578.570	4.688.272	4.720.428	4.778.716	4.743.141
		Menengah	17.746.809	17.438.864	17.223.272	17.048.826	17.061.055	17.043.159	16.352.284	16.232.610	15.610.319
21	Kota Sukabumi	Total	4.384.128	4.399.258	4.439.990	4.435.108	4.475.301	4.523.684	4.555.669	4.611.676	4.611.849
		Mikro	555.954	586.652	625.150	686.214	729.220	772.901	813.209	919.525	958.178
		Kecil	1.250.025	1.260.891	1.281.166	1.256.871	1.187.003	1.211.295	1.216.121	1.231.667	1.204.631
		Menengah	2.578.150	2.551.715	2.533.674	2.492.022	2.559.078	2.539.488	2.526.338	2.460.484	2.449.041
		Total	1.192.894	1.130.886	1.251.347	1.236.660	1.292.350	1.327.343	1.297.508	1.330.542	1.321.375
		Mikro	271.843	257.294	258.526	249.860	245.403	258.452	250.556	244.509	236.078
		Kecil	411.040	392.142	419.090	426.629	447.120	454.750	445.827	457.911	456.194
		Menengah	510.010	481.450	573.731	560.172	599.828	614.141	601.125	628.123	629.103

		Total	1.955.727	1.893.366	1.886.481	1.876.065	1.857.318	1.887.600	1.865.891	1.867.960	1.871.587
22	Kota Cirebon	Mikro	238.046	213.920	215.747	206.876	200.820	196.196	192.099	191.475	184.167
		Kecil	610.396	581.180	615.002	583.041	573.236	589.320	600.030	606.376	605.001
		Menengah	1.107.284	1.098.267	1.055.733	1.086.148	1.083.262	1.102.083	1.073.762	1.070.110	1.082.420
		Total	3.500.990	3.431.720	3.411.519	3.411.839	3.495.179	3.552.894	3.520.516	3.452.101	3.380.551
23	Kota Tasikmalaya	Mikro	452.733	450.618	369.794	364.273	413.185	410.185	355.438	349.571	340.062
		Kecil	1.253.250	1.213.796	1.206.572	1.205.405	1.218.707	1.235.287	1.250.767	1.258.604	1.245.119
		Menengah	1.795.008	1.767.306	1.835.153	1.842.161	1.863.286	1.907.422	1.914.311	1.843.926	1.795.370
		Total	1.890.728	1.846.254	1.874.593	1.741.702	1.773.572	1.791.822	1.794.008	1.768.461	1.762.823
24	Kota Cimahi	Mikro	520.817	499.330	493.534	371.982	362.358	352.204	344.043	333.182	323.523
		Kecil	523.673	511.402	522.356	521.237	526.400	545.723	546.361	559.763	567.695
		Menengah	846.238	835.521	858.703	848.483	884.814	893.895	903.604	875.516	871.606
		Total	5.838.928	5.787.229	5.836.750	5.833.199	5.816.542	5.780.135	5.791.990	5.798.096	5.779.963
25	Kota Depok	Mikro	1.415.722	1.358.300	1.337.341	1.299.574	1.269.164	1.246.455	1.224.993	1.211.744	1.185.380
		Kecil	2.207.752	2.254.537	2.262.875	2.276.350	2.288.972	2.293.425	2.303.647	2.303.762	2.304.774
		Menengah	2.215.453	2.174.393	2.236.534	2.257.274	2.258.407	2.240.254	2.263.350	2.282.589	2.289.809
		Total	9.808.436	9.623.758	9.627.971	9.593.345	9.507.995	9.518.746	9.663.471	9.786.289	9.766.881
26	Kota Bekasi	Mikro	1.265.169	1.197.346	1.180.113	1.144.379	1.115.619	1.093.899	1.074.473	1.073.809	1.047.764
		Kecil	3.945.378	3.911.158	3.907.072	3.927.263	3.926.295	3.956.068	4.011.195	4.059.247	4.134.265
		Menengah	4.597.889	4.515.254	4.540.787	4.521.703	4.466.082	4.468.779	4.577.803	4.653.233	4.584.852
		Total	150.244	147.798	143.074	145.526	147.352	152.293	147.425	148.208	149.570
27	Kab. Pangandaran	Mikro	15.822	14.474	13.739	13.674	13.751	14.015	14.202	14.220	14.613
		Kecil	115.393	114.949	112.832	115.424	116.906	121.494	123.429	126.091	127.422
		Menengah	19.030	18.374	16.503	16.427	16.695	16.784	9.794	7.898	7.534
		Total	150.958.42	147.378.25	147.494.34	147.009.25	147.406.76	148.839.12	148.394.37	149.120.77	147.584.03
28	JAWA BARAT	Total	9	1	3	2	7	1	9	4	9
		Mikro	43.184.128	41.217.432	40.432.470	39.234.307	38.168.121	37.281.196	36.384.155	35.433.282	34.135.135
		Kecil	44.712.083	44.141.215	44.394.760	44.501.313	44.628.366	45.622.051	46.025.933	46.728.257	46.857.538
		Menengah	63.062.218	62.019.605	62.667.112	63.273.632	64.610.280	65.935.874	65.984.292	66.959.234	66.591.367

Sumber: bi.go.id.2021

Daftar Pustaka

- Abdullah, dan Suseno. (2004). *Kebijakan Perbankan*, PPSK, Bank Indonesia.
- Anggraini, D dan Haryadi. (2020). *Analisis perankredit perbankan dalam pendanaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.15.No.2, Juli –Desember 2020. Hal 277 – 286
- Apriyanti, M. E. (2020). *Percaya Diri Dan Berpikir Strategis Untuk Menghadapi Ketatnya Persaingan Bisnis*. Jurnal Usaha Vol 1, No. 2, Desember 2020 Hal 26-40. DOI: <https://doi.org/10.30998/juuk.v1i2.482>
- Ardiansyah, T. (2020). *Model Platform E-Commerce Dalam Mendukung Kesuksesan UMKM Di Indonesia*. Jurnal Usaha Vol 1, No. 1, Juni 2020 Hal 1-12.
DOI: <https://doi.org/10.30998/juuk.v1i1.286>
- Bi.go.id. <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sekda/StatistikRegionalDetail.aspx?idprov=32> . Diakses 10 Juni 2021. Pukul 08.20
- Boediono. (2000). *Ekonomi Moneter Edisi 3*. BPFE UGM : Yogyakarta.
- Goeltom, M.S. (2005). *Kebijakan Perbankan dalam Mendukung Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Makalah disampaikan dalam seminar nasional, diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP-HIPPI)
- Jabar.bps.go.id <https://jabar.bps.go.id/indicator/6/445/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kab-kota.html>. Diakses pada 10 Juni 2021. 08.53
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi 1. Jakarta : Rajawali Pers
- Kontan.co.id. 2021, Maret 31. *Jaditumpuan, perbankan fokus salurkan kredit UMKM*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/jadi-tumpuan-perbankan-fokus-salurkan-kredit-umkm?page=2>
- Laena, I. (2010). *Membedah UMKM Indonesia: Sebuah Kajian Tentang Strategi Pemberdayaan & Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, Jakarta: Lugas Foundation.
- Marti'ah, S. (2021). *Penduduk, Angkatan Kerja, Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Di Jawa Barat*. Jurnal Usaha Vol 1, No. 2, Desember 2020 Hal 1-10. DOI: <https://doi.org/10.30998/juuk.v1i2.500>
- OECD. (2005). *OECD SME and Entrepreneurship Outlook: 2005*, Paris: OECD.
- Permana, S.H., (2017). *Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jurnal Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni 2017 Hal 93-103
- Putra, Ayudyas P. Dan I Ketut S. (2018). *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat, Tingkat Pendidikan Pengusaha, Dan Kewirausahaan Terhadap Produktivitas UMKM Kabupaten Gianyar*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.7, No.8 Agustus 2018. Hal 1796-1825
- Republika.co.id. (2020), Oct 30. *OJK Catat Penyaluran Kredit UMKM Naik jadi Rp. 1.015 Triliun*. <https://www.republika.co.id/berita/qj06hm423/ojk-catat-penyaluran-kredit-umkm-naik-jadi-rp-1015-triliun>
- Undang - undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Veithzal, R. dan Andria P. Veithzal. (2007). *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada